

Relevansi Dimensi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs) dalam Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun

The Relevance of Sustainable Economic Development Dimensions (SDGs) in the Perspective of Ibn Khaldun's Thought

Muchammad Chafidz Muchlisin^{1*}, & Mugiyati²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: mchafidz99@gmail.com¹, mugiyati@uinsa.ac.id²

Abstract

This research discusses the relevance of the dimensions of Sustainable Economic Development (SDGs) in the perspective of Ibn Khaldun's economic thought. The background of this research is the need for an in-depth study of the relationship between classical thinking in Islamic economics and sustainable economic development targets represented by the SDGs so as to provide social and economic welfare for the community. The research method used is a literature study, which involves reviewing literature from books, journal articles, and relevant documents, and using a descriptive analysis approach to Ibn Khaldun's economic thought and its relationship to the pillars of economic development of the SDGs. With the aim of assessing the extent to which the economic concepts proposed by Ibn Khaldun, such as national wealth, economic equilibrium, wage theory, national trade, taxes, and market mechanisms, are relevant to the achievement of the SDGs. The results show that Ibn Khaldun's economic thought is very relevant to several key aspects of the SDGs, such as equitable distribution of wealth, sustainable management of natural resources, and the role of the state in maintaining economic justice and social welfare. Ibn Khaldun's concepts provide the basis for inclusive and sustainable economic development in accordance with the goals of the SDGs, especially in creating decent jobs, reducing inequality, and ensuring balance in the market mechanism.

Penelitian ini membahas relevansi dimensi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs) dalam perspektif pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Latar belakang penelitian ini adalah

History of Article:

Submitted: Jan 7, 2025; Accepted: March 3, 2025; Published: Apr 27, 2025

*Corresponding Author: Muchammad Chafidz Muchlisin



This work is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

perlunya kajian mendalam mengenai keterkaitan antara pemikiran klasik dalam ekonomi Islam dan target pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diwakili oleh SDGs sehingga mampu memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan pengkajian literatur dari buku, artikel jurnal, dan dokumen yang relevan, serta menggunakan pendekatan analisis deskriptif terhadap pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan hubungannya dengan pilar-pilar pembangunan ekonomi SDGs. Dengan tujuan untuk menilai sejauh mana konsep-konsep ekonomi yang diajukan oleh Ibnu Khaldun, seperti kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi, teori upah, perdagangan nasional, pajak, dan mekanisme pasar, relevan dengan pencapaian tujuan SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan beberapa aspek utama SDGs, seperti distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Konsep-konsep Ibnu Khaldun memberikan dasar bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, mengurangi ketimpangan, dan memastikan keseimbangan dalam mekanisme pasar.

Keywords: Sustainable Economic Development (SDGs); Ibn Khaldun, Islamic Economics; Ibn Khaldun's Thought

Pendahuluan

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) saat ini sudah menjadi aktivitas yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu pasar (aktivitas jual beli), pemerintahan, dan setiap individu masyarakat Indonesia, namun bukan hanya di Indonesia, pembangunan ekonomi berkelanjutan sudah menjadi agenda bersama (*common agendas*) dunia internasional baik itu negara maju ataupun negara berkembang¹. Krisis Multidimensi menjadi salah satu konsekuensi yang harus diterapkan dalam pembangunan yang terkonsentrasi pada aspek pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*), yang menjadi dalil utama pentingnya kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu suatu Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun yang akan datang.²

Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh industri manapun dalam mendorong perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah keberlanjutan, namun dalam lingkup perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya tidak selalu menghasilkan sinergi yang

¹ Erling Holden, Kristin Linnerud, and David Banister, "Sustainable Development: Our Common Future Revisited," *Global Environmental Change* 26, no. 1 (2014): 130–39, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006>.

² Addiarrahman, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Kahrudin Yunus (1915-1979)," *Disertasi*, 2020.

baik dari berbagai pihak.³ Hal inilah yang dapat menghambat pemerataan ekonomi suatu negara. Karena pada implementasinya berbagai kebijakan pemerintah yang disajikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan kesenjangan sosial ditengah masyarakat, sehingga makna kesejahteraan ditengah masyarakat Indonesia hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, namun sisanya masih berada dalam lingkaran kemiskinan yang tidak ada ujungnya.⁴ Untuk itu *Sustainable Development Goals* (SDGs) diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan dan bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih nyata.

Pemerintah menempatkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk tujuan (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesenjangan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem lautan; (15) Ekosistem daratan; (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tujuan ini bukan hanya ditetapkan oleh negara Indonesia saja, namun baik itu negara maju maupun negara berkembang yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi suatu negara.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kerangka kerja global yang dirancang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Pilar pembangunan ekonomi dalam SDGs berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pengurangan ketidaksetaraan. Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri menitik beratkan pada 3 faktor yang harus diperhatikan; ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keseimbangan dalam ketiga faktor tersebut diharapkan akan menjadi solusi dalam mewujudkan pembangunan suatu negara serta pemberdayaan lingkungan dan sosial di Masyarakat.

Tujuan *Sustainable Development Goals* yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi maka dirasa perlu untuk

³ Usman et al., "Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 11, no. 1 (2024): 108–26.

⁴ Abdul Aziz, "Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences Promising Business Opportunities in the Industrial Age 4.0 and the Society Era 5.0 in the New-Normal Period of the Covid-19 Pandemic," *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences* 5, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.32474/SJPBS.2021.05.000216>.

mengeksplorasi relevansi pemikiran sarjana muslim yang erat kaitanya dengan nilai-nilai Islam untuk mendorong kesejahteraan sosial. Namun banyak sarjana muslim dalam lintas sejarah umat Islam yang membicarakan persoalan ekonomi sehingga secara sosiologis turut membangun teori dan konsep ekonomi, seperti Abu Yusuf (w. 182 H), Yahya bin Adam (w. 303 H), Al-Ghazali (w. 505 H), Ibnu Rusyd (w. 595 H), al-Izz bin ‘Abdis Salam (w. 660 H), al-Farabi (w. 339 H), Ibnu Taymiah (w. 728 H), Ibnu Khaldun (w. 808 H), al-Maqrizi (w. 845 H), dan lainnya⁵. Pemikiran mereka memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tujuan akhir untuk memastikan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas masyarakat. Mereka menekankan bahwa ekonomi bukan sekadar soal keuntungan, tetapi juga alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, sehingga dapat menjadi jawaban dalam menghadapi tantangan di era modern yang semakin kompleks.

Salah satu pemikiran sarjana muslim yang masih relevan dalam menghadapi era modern dengan tantangan globalisasi yang semakin maju adalah Ibnu Khaldun. Intelektual muslim terkemuka yang dikenang sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam dan dunia, dengan pandangan yang lebih maju hingga melampaui zamannya dan tetap relevan untuk memahami dinamika peradaban manusia⁶. Selain itu, Ibnu Khaldun juga memiliki banyak pemikiran dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik dan kebudayaan.

Salah satu pemikiran Ibn Khaldun yang sangat menonjol dan penting untuk dibahas adalah pemikirannya tentang ekonomi yang memiliki signifikansi besar hingga saat ini sehingga dikenal sebagai bapak ekonomi (*father of economic*).⁷ Oleh karena itu dalam mengupas program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijalankan dalam pilar pembangunan ekonomi, maka juga perlu mengkaji keterkaitan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif pemikiran Ibnu Khaldun.

⁵ Choirul Huda, “Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 103–24, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>.

⁶ N Yani, “Konsep Perekonomian Menurut Ibnu Khaldun Dalam Mensejahterakan Umat,” *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 01 (2024): 26–38, <https://jurnal.stisummulayman.ac.id/gosejes/article/view/207%0Ahttps://jurnal.stisummulayman.ac.id/gosejes/article/download/207/107>.

⁷ Mohammad Ridwan et al., “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 113, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>.

Metode

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan pendekatan penelitian kepustakaan. Tujuan dari melakukan studi kepustakaan adalah untuk membangun hubungan antara tindakan yang berkaitan dengan proses penggabungan data perpustakaan dan memahami komposisi subjek penelitian. Objek dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan program pemerintah tentang ekonomi berkelanjutan, memicu peneliti untuk mengkaji dan membangun hubungan dengan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai bapak ekonomi Islam. Adapun empat karakteristik utama yang harus diperhatikan penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penulis atau peneliti langsung berinteraksi dengan perpustakaan, dari pada secara fisik menjelajah ke lokasi yang didasarkan pada bukti faktual.
2. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan atau akuisisi data di lapangan, karena para peneliti hanya fokus pada naskah atau bahan bacaan yang berfungsi sebagai sumber utama untuk pengumpulan data. Dengan kata lain, data sudah tersedia untuk digunakan.
3. Sumber sekunder mencakup data perpustakaan global, menandakan bahwa peneliti atau penulis tidak mengumpulkan atau memperoleh data dari sumber otentik seperti informan di lapangan. Sebaliknya, data diperoleh dari sumber-sumber seperti manuskrip atau teks (buku). Kriteria seleksi sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder dengan menganalisis dari penelitian lain berdasarkan kata kunci seperti pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun.
4. Studi perpustakaan tidak dibatasi, karena tidak terikat oleh waktu atau ruang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kumpulan penelitian yang dilakukan analisis dan diselidiki melalui berbagai jurnal, artikel, dan dokumen (baik arsip cetak maupun elektronik) bersama sumber data atau sampel lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al Hadrami Al Ishbili Ibnu Khaldun, dilahirkan di Tunisia pada awal Eamadhan 732 H atau pada tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406. Dari ayahnya ia belajar ilmu qir'at. Sementara ilmu hadits, bahasa Arab dan fiqh diperoleh dari para gurunya, Abu al-Abbas al-Qassar dan Muhammad bin Jabir al-Rawi. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi dan beberapa ilmu klasik, termasuk ulum

aqliyah (ilmu filsafat, tasawuf dan metafisika). Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru, yang terpenting adalah: Abu Abdillah Muhammad bin al-Arabi al-Hashasyiri, Abu al-Abbas Ahmad bin alQushshar, dan guru lainnya. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang Ensiklopedis (kamus berjalan)⁸.

Dalam usia muda Ibnu Khaldun sudah menguasai beberapa disiplin ilmu Islam klasik, termasuk ulum aqliyah (ilmu-ilmu kefilosafatan, tasawuf dan metafisika). Di bidang hukum, ia mengikuti mazhab Maliki. Di samping itu semua, ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi, dan lain lain. Setelah menginjak dewasa, Ibnu Khaldun aktif dalam kegiatan politik yang mengantarkannya menduduki posisi strategis. Khaldun muda oleh Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sekretarisnya, padahal waktu itu usianya masih 20 tahun.⁹

Pada tahun 752 H Sultan al-Magrisb al-Aqsa Abu al Hasan meninggal, ia digantikan oleh anaknya Abu Inan. Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Inan ke kota Fez pada tahun 755 H dan diangkat sebagai seorang anggota majlis ilmu (majlis ulama Abu Inan), kemudian diangkat sebagai salah seorang sekretaris sultan. Pada tahun 758 H, namun Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan dengan tuduhan melakukan sabotase untuk menggulingkan kepemimpinan sultan hingga membuatnya dipenjara pada (1357-1358) selama 12 bulan. Sesudah peristiwa itu, Ibnu Khaldun mendukung Abu Salim yang pada tahun 1359 menjadi penguasa maroko, atas dukungan itu Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris negara dan penasihatnya.

Naluri kesarjanaanya telah memaksanya untuk menjauh dari kehidupan politik yang penuh gejolak dan kekerasan. Pengalamannya sebagai utusan raja-raja menjadi bahan penting baginya untuk menyusun tesis-tesisnya dalam *al Muqaddimah*,¹⁰ salah satu karya fenomenalnya yang selesai penulisannya pada Nopember 1377. Sebuah kitab isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia kala itu. *Al-Muqaddimah* secara harfiah berarti 'pembukaan' atau 'introduksi' dan merupakan jilid pembuka dari tujuh jilid tulisan sejarah. Dalam kitabnya, selain membahas tentang kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa (daulah) dan peradaban (umran) kala itu, tetapi *Al-Muqaddimah* juga berisi diskusi tentang ekonomi, sosiologi dan ilmu politik, yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut.

⁸ Revi Fitriani, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Thought of Ibnu Khaldun," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 132.

⁹ Ridwan et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis."

¹⁰ Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun."

Beberapa uraian dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam lintasan sejarah perekonomian dunia tidak kalah dan patut disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonom modern. Wawasan Ibnu Khaldun tentang beberapa prinsip-prinsip ekonomi sangat mendalam dan pemikirannya jauh kedepan sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya hampir enam abad yang lalu sampai sekarang tidak diragukan merupakan perintis dari beberapa formula teori modern. Ibnu Khaldun di dalam bukunya “Al-Muqaddimah”, menyatakan bahwa motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Oleh sebab itu, untuk memahami motif ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut yakni sudut tenaga (*werk, arbeid*) dan dari sudut penggunaannya¹¹. Dari sudut tenaga Ibnu Khaldun membedakan menjadi 2, yakni “Ma’asy” tenaga untuk mengerjakan barang sesuai kebutuhan sendiri, dan “Tamawwul” tenaga untuk mengerjakan barang yang dapat memenuhi kebutuhan banyak orang. Dari sudut pandang penggunaannya juga dibagi menjadi 2 yakni, “Rizqy” kegunaan barang yang dihasilkan hanya untuk kepentingan pribadi, dan “Kasab” kegunaan barang untuk kepentingan banyak orang.

Ibnu Khaldun juga menawarkan konsep ekonomi untuk pembangunan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat, konsep ini diantaranya:

1. Konsep Kekayaan Nasional, dimana menurut Ibnu Khaldun kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimiliki suatu bangsa, Sejarah Panjang suatu bangsa juga mempengaruhi kekayaan nasional dengan memanfaatkannya secara produktif baik dilakukan oleh pemerintah maupun penduduknya.
2. Konsep Keseimbangan Ekonomi Makro, akan cenderung menyeimbangkan kondisi ekonomi mereka dengan cara membuat penyesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat.
3. Konsep Teori Upah, Ibnu Khaldun Mengatakan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah derived demand, dan penawaran ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan, dan tingkat pendapatan ditentukan oleh kerajinan yang dimiliki oleh tenaga kerja.
4. Perdagangan nasional: Ibnu Khaldun, melalui karyanya Muqaddimah, menyatakan bahwa perdagangan adalah sumber utama kekayaan negara.

¹¹ Indra Hidayatullah, “Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar,” *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2018): 117–45, <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/iqtishoduna/article/view/211>.

Perdagangan memungkinkan perpindahan barang dan jasa antar wilayah, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya spesialisasi dalam produksi untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan melalui perdagangan. Kota-kota menurutnya menjadi pusat ekonomi yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan perdagangan.¹²

5. Konsep pajak, pajak yang tinggi menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk memproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan oleh konsumen, maka menurut Ibnu Khaldun pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk sehingga akan menurunkan gairah masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.
6. Konsep Mekanisme Pasar, Ibnu Khaldun menyatakan mekanisme pasar tersebut, diharuskan adanya asas moralitas antara lain; persaingan sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan keadilan (justice). Mekanisme pasar juga diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak untuk pertumbuhan ekonomi.¹³

Relevansi SDGs dalam Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Sustainable Development Goals (SDGs) harus diperkuat sebuah konsep dan analisis ekonomi Islam dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan dasar pemikiran Ibnu Khaldun, uraian pemikiran Ibnu Khaldun diformulasikan menjadi sebuah buku yang berjudul *Al-Muqoddimah* Dimana uraian beberapa pemikirannya disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonom modern dengan prinsip-prinsip dan teori ekonomi yang masih relevan digunakan dalam menjawab persoalan ekonomi guna membangun kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan mempunyai peranan penting dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha demi mencapai tujuan dari ekonomi berkelanjutan, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, hal ini relevan dalam perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun yang dikemukakan dalam karya monumentalnya yakni *Muqadimmah* yang di dalamnya memberikan gambaran tentang konsep kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan nasional, uang, pajak dan mekanisme pasar yang berguna dalam pengkajian pembangunan ekonomi

¹² Ibn Khaldun, *The Muqaddimah – An Introduction to History* (F. Rosenthal Trans.), 1967, [https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The Muqaddimah ? An Introduction to History by Ibn Khaldun.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The_Muqaddimah?_an=Introduction+to+History+by+Ibn+Khaldun.pdf).

¹³ Yani, “Konsep Perekonomian Menurut Ibnu Khaldun Dalam Kesejahteraan Umat.”

yang adil dan makmur. Berangkat dari persoalan ekonomi dalam mewujudkan tujuan ekonomi berkelanjutan, maka diperlukan sebuah konsep dan analisis ekonomi Islam yang masih sangat relevan untuk dikembangkan dalam mengkaji penerapan Sustainable Development Goals dalam perspektif ekonomi Ibnu Khaldun. Secara garis besar terdapat 6 Prinsip ekonomi dan analisis pemikiran Ibnu Khaldun diantaranya:

1. Kekayaan Nasional

Kekayaan nasional dalam konteks penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada pilar pembangunan ekonomi memiliki peran sentral, karena berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pilar ekonomi, kekayaan nasional meliputi aset fisik (seperti tanah, sumber daya alam, dan infrastruktur), modal manusia (tenaga kerja yang terdidik dan produktif), serta modal sosial dan kelembagaan sebagai tata kelola yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pilar pembangunan ekonomi, kekayaan nasional dilihat dari perspektif Resource Management yang berkelanjutan, yang mana dalam penerapannya masuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, khususnya pada tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini berarti negara harus memanfaatkan sumber daya seperti energi, air, hutan, dan bahan mineral dengan bijak, menghindari eksploitasi berlebihan, dan berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan agar kekayaan alam dapat diwariskan kepada generasi mendatang, selain itu produktifitas dalam pembangunan ekonomi juga berdampak dalam kekayaan nasional juga mencakup infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi. SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) menggarisbawahi pentingnya investasi dalam infrastruktur yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan akses internet yang dapat menggerakkan perekonomian tanpa mengorbankan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pemikiran ekonomi Ibnu Kaldun dalam konsep kekayaan nasional yang mana dalam karya muqaddimah menyatakan bahwa:

“Pertanyaan yang harus dijawab adalah; di manakah letak kekayaan nasional itu?. (jawabnya) harus diketahui bahwa emas, perak, dan batu-batuan berharga lainnya tidak ada bedanya dengan mineral-mineral (lainnya)

dan kapital, yang diperoleh dari biji besi, tembaga, dan mineral-mineral biasa lainnya. Adalah karena peradaban yang menyebabkan semuanya itu ditemukan dan menentukan jumlahnya naik atau turun. Penduduk umumnya berfikir bahwa kemakmuran bangsa ditentukan oleh seberapa besar cadangan emas dan perak yang dimilikinya, padahal, sesungguhnya tidaklah demikian. Sebuah peradaban yang hebat mampu menghasilkan keuntungan yang besar, itu karena jumlah tenaga kerja efektifnya tersedia dengan cukup.”

Dari pendapat tersebut tampak bahwa kekayaan nasional yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun mirip dengan konsep pendapatan nasional yang biasanya ada dalam literatur ekonomi makro modern. Oleh karena itu, kekayaan suatu bangsa bisa saja mengalami peningkatan atau penurunan, bergantung pada kemampuan pemerintah maupun para penduduk dan para pelaku usaha dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika terdapat tenaga kerja efektif yang lebih banyak dan mereka dimanfaatkan sepenuhnya, maka kemakmuran bangsa itu pun meningkat, begitupun sebaliknya. Hal ini ditujukan untuk pembangunan Ekonomi Inklusif dan mempunyai peran dalam pengurangan ketimpangan demi memastikan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang peran tenaga kerja dalam kemakmuran suatu bangsa dapat dibandingkan dengan pandangan ekonom kontemporer seperti Joseph Stiglitz dan Amartya Sen, yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi inklusif. Joseph Stiglitz dan Amartya Sen berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja yang merata dan pengurangan ketimpangan sosial.¹⁴ Ibnu Khaldun sudah lebih dahulu menyoroti bahwa ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan kemunduran peradaban karena ketidakadilan dan lemahnya perputaran ekonomi. Baik pemikiran ekonomi klasik maupun kontemporer sepakat bahwa kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi bukanlah akumulasi kekayaan dalam bentuk logam mulia, melainkan produktivitas tenaga kerja dan distribusi kesejahteraan yang adil.

2. Keseimbangan Ekonomi

Pemerintah menjadi peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara, bukan hanya mengacu pada perekonomian konvensional dimana lebih memperhatikan perbaikan dalam peningkatan

¹⁴ Dassucik, D., & Farida, I. (2025). PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: STRATEGI MENUJU NEGARA BERKEMBANG. *Penerbit Tahta Media*.

ekonomi tanpa memandang keseimbangan ekonomi masyarakatnya, sejalan dengan SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), yang mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan sumber daya bagi generasi mendatang. Dalam konsep pemikiran Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara konsumsi dan produksi, yang menurutnya adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan ekonomi. Ia memperingatkan bahwa konsumsi berlebihan dapat mengakibatkan kemerosotan ekonomi dan keruntuhan sosial.

Selain itu keseimbangan ekonomi juga berarti memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dan peran negara dalam memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir elit. Ini relevan dengan SDGs 10 (Pengurangan Ketimpangan), yang menyerukan perlunya kebijakan redistribusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan memastikan bahwa kekayaan nasional dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun mengenai keseimbangan ekonomi memiliki relevansi yang kuat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui konsep keseimbangan antara konsumsi dan produksi, keadilan dalam distribusi kekayaan sehingga dapat mengurangi keimpangan ekonomi dilapisan Masyarakat.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit akan melemahkan ekonomi karena menurunnya daya beli masyarakat luas. Hal ini mirip dengan gagasan John Maynard Keynes, yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengelola perekonomian, termasuk melalui kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Keynes berargumen bahwa dalam situasi ketimpangan ekonomi yang tinggi, permintaan agregat akan melemah, menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.¹⁵ Oleh karena itu, baik Ibnu Khaldun maupun Keynes mengakui bahwa peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi sangat penting agar distribusi kekayaan tidak hanya berpusat pada segelintir kelompok kaya.

Selain itu, pemikiran Ibnu Khaldun tentang pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan memiliki relevansi dengan teori ekonomi kontemporer yang dikemukakan oleh Thomas Piketty. Dalam bukunya *Capital in the Twenty-First Century*, Piketty mengungkapkan bahwa tanpa kebijakan

¹⁵ Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., ... & Milia, J. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

redistribusi yang tepat, kesenjangan ekonomi akan semakin meningkat karena akumulasi kapital yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun bahwa distribusi kekayaan yang timpang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan kemunduran ekonomi suatu bangsa. Dengan demikian, baik pemikiran klasik Ibnu Khaldun maupun teori ekonomi kontemporer menekankan pentingnya kebijakan redistribusi yang adil sebagai upaya mengurangi ketimpangan ekonomi, yang juga menjadi tujuan utama SDGs 10 tentang pengurangan ketimpangan.

3. Teori Upah

Dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, tak terlepas dari peranan pemerintahan dalam memberdayakan usaha-usaha dalam negeri demi pembangunan ekonomi masyarakat, bantuan modal usaha, pelatihan dalam meningkatkan skill berwirausaha sehingga menjadi komponen penting yang harus dijaga dari semua pemangku ekonomi untuk meningkatkan upah Masyarakat. Sesuai dengan SDGs 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang mana Teori upah Ibnu Khaldun terkait erat dengan pentingnya pekerjaan layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan SDGs 10 Pengurangan Ketimpangan: Upah yang adil membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok sosial.

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa diferensiasi upah disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja, namun sekarang bukan hanya perbedaan kemampuan saja, perbedaan sifat dan karakter dalam setiap profesi serta mobilitas tenaga kerja dapat menimbulkan ketimpangan dan menjadi suatu persoalan hingga menimbulkan diferensiasi upah, hal inilah yang akan menghambat pemerataan ekonomi masyarakat. Sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan yang layak dalam pertumbuhan ekonomi serta mampu mengurasi deferensiasi upah bagi mayarakat.

Berdasarkan konteks ekonomi kontemporer, diferensiasi upah tidak hanya disebabkan oleh perbedaan keterampilan, tetapi juga oleh faktor struktural seperti globalisasi, otomasi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Ekonom seperti Joseph Stiglitz menekankan bahwa kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ini, misalnya dengan meningkatkan akses pendidikan, memperkuat perlindungan tenaga kerja,

¹⁶ Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.

serta mendorong kebijakan upah minimum yang adil.¹⁷ Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun bahwa pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan adanya kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, meskipun Ibnu Khaldun lebih menekankan aspek individual dalam diferensiasi upah, ekonomi modern menyoroti peran pemerintah dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif agar ketimpangan pendapatan dapat diminimalkan dan pemerataan ekonomi dapat tercapai.

4. Perdagangan Nasional

Perdagangan nasional menjadi pendorong dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, upaya dalam meningkatkan ekonomi suatu negara berkaitan dengan produksi dan distribusi, melalui program pembangunan ekonomi berkelanjutan pemerintah telah melakukan berbagai kerjasama dalam jual beli serta pemanfaatan hasil produksi dalam negeri, hal ini membantu membuka peluang perdagangan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat sesuai dengan tujuan SDGs 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dalam pilar pembangunan ekonomi, selain itu dapat mengembangkan industri baru bagi masyarakat dan mendorong tujuan SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Serta tujuan SDGs 10 sebagai upaya pengurangan ketimpangan melalui akses yang lebih luas terhadap pasar.

Sejalan dengan Konsep perdagangan nasional menurut Ibnu Khaldun yang menekankan peran penting perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan negara, dan stabilitas sosial. Ia menyoroti pentingnya spesialisasi dan mendorong upaya dalam pengurangan ketimpangan, peran negara dalam regulasi perdagangan juga harus dilaukan dengan adil, seimbang dan moralitas dalam bisnis. Selain itu Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa perdagangan memungkinkan pertukaran barang antara wilayah yang memiliki kelebihan barang tertentu dengan wilayah yang membutuhkannya. Ini menciptakan aliran kekayaan dan memperkaya ekonomi secara keseluruhan. Menurutnya, perdagangan memperluas jangkauan ekonomi lokal dan berfungsi sebagai penggerak utama kemakmuran ekonomi suatu wilayah atau negara. Pemikirannya tentang perdagangan nasional memberikan dasar bagi prinsip-prinsip ekonomi modern, di mana keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan menjadi kunci untuk mencapai kemakmuran dan keberlanjutan ekonomi.

¹⁷ Stiglitz, J. E. (2008). *Selected Works of Joseph E. Stiglitz: Volume I: Information and Economic Analysis* (Vol. 1). OUP Oxford.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, pemikiran Ibnu Khaldun juga dapat dikaitkan dengan gagasan Joseph Stiglitz tentang perdagangan yang adil (*fair trade*). Stiglitz berpendapat bahwa globalisasi dan perdagangan bebas sering kali menciptakan ketimpangan jika tidak diatur dengan baik, sehingga negara harus berperan aktif dalam memastikan distribusi keuntungan perdagangan yang lebih merata.¹⁸ Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun yang menekankan bahwa perdagangan harus membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir elit. Oleh karena itu, baik dalam pemikiran klasik maupun modern, peran negara dalam mengatur perdagangan secara adil tetap menjadi faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Konsep Pajak

Sustainable Development Goals (SDGs) sangat terkait dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi. Pajak berperan penting dalam pencapaian berbagai tujuan SDGs, terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam penerapannya, Pajak berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di dalam negara. SDGs 10 menekankan pentingnya pengurangan ketimpangan melalui kebijakan fiskal yang adil, termasuk penerapan pajak progresif. Pajak dari kelompok yang lebih kaya dapat digunakan untuk mendanai program-program yang membantu kelompok yang kurang mampu, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur (SDGs 9 - Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) menekankan pentingnya infrastruktur yang kuat dan modern sebagai dasar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pajak yang dikumpulkan oleh negara dapat digunakan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, transportasi, energi, dan teknologi, yang pada akhirnya mendorong produktivitas dan kemakmuran ekonomi. Pajak memainkan peran kunci dalam membiayai proyek-proyek publik yang penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Sejalan dengan dengan pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak memiliki relevansi yang signifikan dengan konsep perpajakan modern. Ia menekankan keadilan, proporsionalitas, dan peran pajak dalam menjaga produktivitas ekonomi serta stabilitas sosial.

¹⁸ Stiglitz, J. E. (2008). *Selected Works of Joseph E. Stiglitz: Volume I: Information and Economic Analysis* (Vol. 1). OUP Oxford.

Konsepnya tentang pentingnya moralitas dalam pemungutan pajak dan penggunaan pajak untuk kepentingan umum juga sangat sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik. Pajak, menurut Ibnu Khaldun, harus dikelola dengan bijak agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tanpa menyebabkan ketimpangan atau ketidakstabilan.

Pemikiran Ibnu Khaldun juga sejalan dengan prinsip perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, khususnya mengenai keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Smith mengusulkan empat prinsip utama perpajakan, yaitu kesetaraan (*equity*), kepastian (*certainty*), kemudahan (*convenience*), dan efisiensi (*efficiency*). Konsep ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang menekankan bahwa pajak harus diterapkan secara adil, tidak memberatkan masyarakat, dan dikelola untuk kesejahteraan umum. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa pemerintah harus menggunakan pajak secara transparan dan efektif untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, baik dalam perspektif klasik maupun modern, pajak dipandang sebagai alat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mengurangi ketimpangan sosial.

6. Mekanisme Pasar

Konsep Mekanisme Pasar dalam SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi berfokus pada cara pasar berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pilar pembangunan ekonomi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan, dengan demikian sejalan dengan Mekanisme pasar dalam SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pasar harus mampu mendorong penciptaan peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Mekanisme pasar yang sehat akan meningkatkan produktivitas dan inovasi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu SDGs 10 (Pengurangan Ketimpangan) menekankan pentingnya mekanisme pasar yang memberikan akses yang adil dan merata bagi semua individu dan kelompok. Ketimpangan ekonomi dapat dikurangi dengan

memastikan bahwa semua pelaku ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah, memiliki akses yang setara terhadap pasar dan sumber daya. Mekanisme pasar yang adil juga mencakup kebijakan yang mendorong redistribusi kekayaan, yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan inklusivitas ekonomi, selain itu Mekanisme pasar juga mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri dan inovasi. Mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam konteks SDGs sangat kuat, terutama dalam aspek pertumbuhan ekonomi inklusif, pengurangan ketimpangan, dan pentingnya peran negara dalam mengatur pasar untuk menjaga keadilan. Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa pasar tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang harus diatur dan dipandu oleh prinsip keadilan dan keseimbangan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Salah satu pemikir ekonomi modern yang memiliki pandangan serupa adalah John Maynard Keynes. Keynes berpendapat bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan secara otomatis, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan gagasan Ibnu Khaldun bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar, mencegah monopoli, serta memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit ekonomi.

Kesimpulan

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun terkait kekayaan nasional masuk dalam segala pilar pembangunan ekonomi. keseimbangan ekonomi, upah, perdagangan nasional, pajak, dan mekanisme pasar sangat relevan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ia menekankan bahwa kekayaan nasional bergantung pada produktivitas tenaga kerja dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan ruang bagi peneliti lain untuk menganalisis SDGs dalam perspektif tokoh muslim lainnya yang dapat memberikan sudut pandang berbeda dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Bibliography

- Addiarrahman. “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Kahrudin Yunus (1915-1979).” *Disertasi*, 2020, 1–223.
- Aziz, Abdul. “Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences Promising Business Opportunities in the Industrial Age 4.0 and the Society Era 5.0 in the New-Normal Period of the Covid-19 Pandemic.” *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences* 5, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.32474/SJPBS.2021.05.000216>.
- Bappenas. “Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” 2023 01 (2023): 221.
- . “Metadata Pilar Ekonomi.” *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*, 2020, 1–106.
- Efendi, Zulfan. “Ibnu Khaldun Dan Teori Peradaban : Relevansi Pemikirannya Dalam Dunia Modern” 4 (2024): 2198–2210.
- Fitriani, Revi. “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Islamic Thought of Ibnu Khaldun.” *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2, no. 2 (2019): 132.
- Gusfira, Adelia, Azza Bunaia, Valina Sinka, Ahmad Wahyudi Zein, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Utara Medan. “Pengaruh Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia,” 2024.
- Hidayatullah, Indra. “Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar.” *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2018): 117–45. <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/iqtishoduna/article/view/211>.
- Holden, Erling, Kristin Linnerud, and David Banister. “Sustainable Development: Our Common Future Revisited.” *Global Environmental Change* 26, no. 1 (2014): 130–39. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006>.
- <https://sdgs.bappenas.go.id>. “Kolaborasi Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan,” 2018. <https://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>.
- Huda, Choirul. “Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 103–24. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Making Indonesia 4.0: Strategi Nasional Transformasi Industri Indonesia,” 2020. <https://kemenperin.go.id>.
- Khaldun, Ibn. *The Muqaddimah – An Introduction to History* (F. Rosenthal Trans.), 1967. [https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The Muqaddimah ? An Introduction to History by Ibn Khaldun.pdf](https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/The_Muqaddimah?An+Introduction+to+History+by+Ibn+Khaldun.pdf).
- Purwitasari, Aulya, Binti Mutafarida, and Yuliani. “Urgensi Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 656–66. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>.
- Ridwan, Mohammad, Abdul Ghofur, Rokhmadi Rokhmadi, and Gama

- Pratama. “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis.” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 113. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN: PERAN EKONOMI ISLAM DALAM ERA MODERN.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. “Indonesia Luncurkan Laporan Kerangka Kerja Pembiayaan Nasional Terintegrasi Untuk Jembatani Kesenjangan Pembiayaan SDGs.” United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, 2021. <https://www.undp.org/id/indonesia/press-releases/indonesia-luncurkan-laporan-kerangka-kerja-pembiayaan-nasional-terintegrasi-untuk-jembatani-kesenjangan-pembiayaan-sdgs>.
- Usman, Wartoyo, Nur Haida, and Nining Wahyuningsih. “Implementasi *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 11, no. 1 (2024): 108–26.
- Yani, N. “Konsep Perekonomian Menurut Ibnu Khaldun Dalam Mensejahterakan Umat.” *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 02, no. 01 (2024): 26–38. <https://jurnal.stisummulayman.ac.id/gosejes/article/view/207>